

REPRESENTASI IDEOLOGI APARATUR NEGARA DALAM MEDIA
(Studi Konstruksi Realitas wartawan Humas Pemda DKI
mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan Website beritajakarta.com)

REPRESENTATION OF STATE APPARATUS IDEOLOGY IN MEDIA
(Study of Construction Reality Pemprov DKI Public Relation Journalist about Environment in
Beritajakarta.com website News)

Launa

Dosen ilmu Politik pada Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta.
 (Naskah diterima 29 Agustus 2017 by email; diperiksa dan direvisi tim redaksi 4 September 2017;
 disetujui terbit oleh PR. 23 Oktober 2017)

ABSTRACT

This research is basically trying to find the ideology represented by state apparatus (Jakarta Public Relation Journalist) through the construction of reality about the environment of Local Government of DKI in news on beritajakarta.com website. From the results of the analysis related to the 'Minor Theme' (frame) and Government Apparatus Discourse, it is concluded that although journalists seem to position Jakarta Provincial Government as a 'positive' party in the construction of reality, they occasionally seem to attempt to position the parties in outside the Provincial Government of DKI in the discourse. Then it is related to the 'Government' interest (DKI) versus 'Public Interest', it is concluded that in reality construction the reporters tend to be more in favor of the Jakarta Provincial Government as their 'master'. Then related to the "Apparatus Ideology Behind the News on the environment of the Local Government of DKI in beritajakarta.com website", then starting from the argument concerning the concept of governance and government, it can be identified and interpreted that: the apparatus ideology behind the news, it seems more representative ideology of government rather than the ideology of governance. Thus, the dominant ideology behind the news on beritajakarta.com website it is a government ideology. Thus, journalists of the state apparatus seem to be more concerned with the interest of the Jakarta Government than the citizens/the public of DKI Jakarta.

Keywords: Representation; Ideology; Media; Ideology of Media; State Apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitasnya mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari hasil analisis terkait dengan “Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah disimpulkan bahwa meskipun wartawan tampak lebih banyak memposisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang ‘positif’ dalam konstruksi realitasnya, namun mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memposisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewartawannya. Kemudian terkait dengan “Kepentingan (*interest*)” Pemerintah (Pemprov DKI) versus “Kepentingan (*interest*) Publik”, disimpulkan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan pihak wartawan cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pihak Pemprov DKI sebagai ‘tuannya’. Kemudian terkait dengan “Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.”, maka bertolak dari argumentasi menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan itu, tampaknya lebih merepresentasikan ideologi *government* dari pada ideologi yang *Governance*. Dengan demikian, ideologi yang dominan di balik pemberitaan di website beritajakarta.com. itu adalah ideologi yang berifat *Government*. Jadi, wartawan aparat negara tampaknya lebih mementingkan *interest* pihak Pemda DKI dari pada pihak warga/publik DKI Jakarta.

Kata-kata kunci : Representasi ; Ideologi; Media; Ideologi Media; Aparatur Negara.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Kegagalan konsep sentralisasi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan yang semula menekankan pada institusi pemerintah (*government*) menjadi *governance*, yakni suatu konsep yang memandang pemerintahan sebagai suatu proses yang tidak lagi bersifat “*intra bureaucratic anality*”¹ Kinerja pemerintahan harus dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi (Oyugi Edward, 2000: 67-69, dalam penelitian Anti-Corruption Research).

¹Perspektif yang melihat aktivitas dan kekuasaan pemerintahan di dalam dirinya sendiri.

Konsep *governance* dimunculkan sebagai alternatif model dan metode *governing* (proses pemerintahan) yang lebih mengandalkan pada pelibatan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, semi pemerintah, atau non pemerintah, seperti lembaga bisnis, LSM, komunitas, atau lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan cara pandang itu, sekat-sekat formalitas negara atau pemerintah menjadi terabaikan.

Lebih jauh, konsep *governance* melihat kegiatan, proses atau *kualitas memerintah*, bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan itu. Kebijakan bukan dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok tertentu melainkan muncul dari proses konsultasi antara berbagai pihak yang terkena oleh kebijakan itu (Oyugi, 2000: 30-31). Dengan begitu, berarti prinsip *bottom up* jadi sangat diutamakan dalam aplikasi konsep *governance*.

Dalam konsep ini, sejalan dengan makna *bottom up* tadi, maka pemerintah jadi bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, maka dalam hubungan ini *governance* melibatkan relasi antara berbagai kekuatan dalam negara, yakni pemerintah (*state*), *civil society*, *economic society*, dan *political society* (Corbett 2000: 23-27; Keating, 1999: 40-43).

Mengingat demikian luasnya cakupan substansi permasalahan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks *governance* itu, karenanya penerapan prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini masih menunjuk pada empat indikator utama, yakni seperti sebagaimana dikatakan oleh pihak Bappenas yakni terdiri dari : 1) Transparansi (*Openness and Transparency*); 2) Partisipasi Masyarakat (*Participation*); 3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (*Accountability*); 4) Supremasi Hukum (*Rule of Law*). (Bapenas, 2008: 15). Keempat prinsip tersebutlah yang oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS disebut dengan "*More Administrative Good Governance*".

Dalam praktiknya, maka guna memenuhi kepentingan pengakomodiran ke empat unsur tadi, maka diantaranya yang terkait dengan publik, diperlukan adanya institusi/lembaga/bagian yang memiliki fungsi sebagai penghubung manajemen dengan pihak publik.²Institusi/lembaga/bagian tersebut idealnya adalah berupa Hubungan Masyarakat (Humas)³ yang lazim juga dikenal dengan istilah *Public Relation* (PR). Dalam kaitan ini, maka Humas itu diharapkan bisa berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara pihak masyarakat dengan pihak Pemerintah atau sebaliknya. Dengan begitu maka Pemerintah atau Humas di sini dapat berperan sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, atau sebaliknya yang berupa informasi berupa *in put*.

Humas Pemerintah (*Government Public Relations*) sendiri, dalam memerankan fungsi sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam mengaplikasikannya itu bisa dilakukan dengan berbagai modus. Diantaranya tersebutlah seperti melalui aktifitas *media relations*, *pembuatan press release*, melaksanakan konferensi pers, pers tour, membuat media-media seperti majalah, bulletin, boklet, radio, atau bahkan membuat *website* khusus guna memenuhi kepentingan publikasi menyangkut institusi beserta aktifitasnya serta menyangkut persoalan dinamika lingkungan institusi.

Salah satu institusi pemerintah yang pihak Humasnya sudah sampai pada tahap pemanfaatan *website* guna memerankan fungsi kehumasannya itu, yaitu pihak Humas Pemda DKI. Aktivitas virtual Humas Pemda DKI sendiri difasilitasi melalui website beritajakarta.com. Kehadiran mana, sebenarnya juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai *Cyber City*⁴.

²Keempat unsur yang diadopsi itu sendiri dilakukan dalam rangka merespon prinsip platform pemerintahan era reformasi yang berbasis penerapan prinsip demokrasi yang seluas-luasnya termasuk bidang pemerintahan.

³Menurut Sam Black dalam bukunya *Practical Public Relations*, mengklasifikasikan humas menjadi "humas pemerintahan pusat (*central government*) dan "humas pemerintahan daerah (*local government*), (dalam Onong Uchjana Effendy. Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, Remaja Rosdakarya Bandung, 2002, h. 37

⁴Sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah pula memiliki sistem informasi yang menggunakan jaringan komunikasi dunia maya atau berbasis Web antara lain *e-procurement*, website www.jakarta.go.id, sistem informasi keuangan daerah, sistem perencanaan daerah, sistem pajak kendaraan bermotor, produk hukum online, dan lain-lainnya merupakan Portal Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka memerankan fungsi kehumasan pemerintah yang eksis dalam iklim “*governance*” saat ini, Website beritajakarta.com sebagai media resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang nota bene kendalinya berada di tangan para aparat pemerintah, karenanya dengan sendirinya terkondisi dalam situasi menghadapi dua sisi yang kontras saat ini. Disatu sisi, mau tidak mau harus membangun citra positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di sisi lain dalam pemberitaannya harus berorientasi kepada kepentingan publik demi tidak ditinggalkan oleh audiensnya.

Dua sisi kontras menyangkut penunaian dua ‘kepentingan’ yang nota bene eksis dalam iklim pemerintahan yang “*governance*” itu, secara relatif tentu menjadi sulit bagi para aparaturnya pengelola Website beritajakarta.com. Dalam kesulitan yang demikian, apakah para aparat negara yang berperan wartawan itu akan tergelincir pada upaya membela kepentingan publik atau sebaliknya tegelincir pada membela kepentingan pemerintah dalam pewartawanan mereka melalui media Website beritajakarta.com.

Kecurigaan yang demikian itu tentu pantas dimunculkan, terutama jika itu mengacu pada perspektif kritikal. Dalam perspektif kritikal, satu diantaranya yang tergabung di situ misalnya Louis Althusser⁵, maka aparaturnya media itu katanya tidak beda halnya dengan manusia lain, yakni mempunyai watak dasar. Watak dasar manusia itu sendiri menurut Althusser, adalah binatang ideology (Althusser; 2004: 48). Sebagai binatang ideology maka ideology menginterpelasi individu menjadi subjek.(Althusser, 2004:47). Dengan demikian pewartawanan media itu merupakan bentuk atau representasi dari praktik ideologis pengelola media/pemilik media.⁶ Dengan begitu pula maka mereka sebagai *binatang ideology* diarahkan ideology-nya sendiri dalam mewacanakan beragam persoalan. Jadi, ideology merupakan faktor yang menentukan bagaimana suatu fakta diambil, dibuang, dipahami dan dikodefikasi lalu diteksasikan dalam media. Semua proses ini dipandang sebagai konsekuensi dari ideology, bukan sebagai bias atau kesalahan pekerja pers.

Berdasarkan pemaparan argumen pada bagian latar belakang sebelumnya, maka melalui tesis ini akan coba dibongkar tipologi ideology yang berada di balik pewartawanan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitas mereka tentang institusi beserta aktifitasnya serta menyangkut persoalan dinamika lingkungan institusi dalam Website beritajakarta.com. Untuk kepentingan menjawab permasalahan tersebut, maka permasalahan tesis ini dirumuskan menjadi : “Ideologi apakah yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitas mereka mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com ?”

B. Signifikansi

Penelitian ini ingin menemukan/mengidentifikasi ideology aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) yang berada di balik peng-konstruksirealitas mereka mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari Segi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah memadai bagi penelitian-penelitian ilmu pemerintahan yang berbasiskan komunikasi politik yang ber-paradigma-kan konstruktivis, terutama yang berkaitan dengan fenomena keterkaitan aparaturnya negara dengan media pemberitaan. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak aparaturnya pemerintah dan utamanya pihak Humas Pemerintah dalam kaitan dengan aktifitasnya sebagai wartawan yang berposisi ganda dalam iklim pemerintahan yang kini beriklim “*governance*”.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep-Konsep Teoritik

1. Aparatur Negara

⁵Dalam pandangannya, media komunikasi merupakan *communication ISA*. Terkait dengan ini, hal (1980) sebagaimana dikutip Barret dan Newbold (1995: 190) mengatakan bahwa *media as relatively autonomous c*

⁶ Althusser, Louis, Tentang Ideology: Marxisme, Strukturalis, Psikoanalisis dan Cultural Studies, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.

Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri, Negara, alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan, dan kepegawaian yg mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan disamping faktor lain seperti uang, alat-alat yang berbasis teknologi misalnya komputer dan internet. Oleh karena itu sumber daya aparatur harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan untuk mewujudkan profesional pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi dengan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya.

Sebuah lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Soerwono Handyaningrat yang mengatakan bahwa: Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian (Handyaningrat,1982:154).

Aparatur menurut definisi diatas dikatakan bahwa aparatur merupakan organisasi kepegawaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau negara dalam melayani masyarakat. Aspek-aspek administrasi merupakan kelembagaan atau organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Setyawan Salam dalam buku yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa "Aparatur Pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku" (Setyawan, 2004:169).

Berdasarkan pengertian di atas, maka aparatur pemerintahan merupakan seseorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang ada. Aparatur suatu instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab, agar terciptanya kualitas suatu kinerja yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya. Suatu instansi pemerintah tidak akan lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan.

Soerwono Handyaningrat mengatakan bahwa: "Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian" (Soewarno,1982:154).

Berdasarkan Pengertian diatas maka Aparatur adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Maka diperlukan aspek-aspek administrasi terutama kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara dibutuhkan suatu alat untuk mencapai tujuan organisasi, maksud alat disini adalah seorang aparatur atau pegawai yang ada dalam suatu pemerintahan atau negara.

2. Wacana Media

Menurut McGregor, wacana mengacu pada pendeskripsian seseorang dalam beberapa kata. Wacana merupakan cara untuk mengetahui, menilai, dan mengalami. Wacana dapat digunakan untuk penegasan kekuasaan dan pengetahuan, dan dapat pula digunakan untuk perlawanan dan kritik.⁷

Cara penyampaiannya, itu bisa dilakukan melalui percakapan lisan maupun tulisan, misalnya melalui media cetak seperti surat kabar lewat pemberitaannya. Dengan demikian, dari pengertian McGregor ini sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa di balik suatu wacana itu sesungguhnya tersimpan maksud-maksud tertentu dari pembuat wacana, misalnya sebagai cara dalam memanifestasikan kekuasaan. Akan tetapi, makna diskursus sebagaimana dimaksudkan McGregor ini, kerap pula tidak dimaknai sejauh itu oleh

⁷ McGregor, Sue L.T., dalam, "Critical Discourse Analysis- A Primer", dalam <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>, p. 2.

kalangan awam. Maknanya, sebagaimana disadari secara awam, tidak lebih dari sekedar perbincangan belaka.

Secara etimologi, wacana dalam kamus online Merriam Webster dijelaskan sebagai berikut : "Middle English *discours*, from Medieval Latin & Late Latin *discursus*; Medieval Latin, *argument*, from Late Latin, *conversation*, from Latin, *act of running about*, from *discurrere* to run about, from *dis-*+*curre*retorun-moreat *car*." ⁸Jadi ,wacana sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Latin yang berarti lari kian kemari (yang diturunkan dari *dis-*'dari, dalam arah yang berbeda', dan *curre*'lari'). Lebih jauh, kamus ini juga menjelaskan bahwa diskursus itu juga berarti sebagai suatu pertukaran gagasan melalui bahasa verbal, khususnya dalam suatu percakapan. Disebutkan pula bahwa diskursus berkaitan dengan bahasa lisan atau tulisan. Lebih luas lagi, diskursus diartikan juga sebagai satu unit kebahasaan (sebagai sebuah percakapan atau sebuah sejarah) yang lebih luas dari pada sebuah kalimat⁹. Dengan pengertian terakhir ini, maka secara leksikal memang telah mengindikasikan bahwa diskursus itu bukan sekedar percakapan belaka, namun di dalamnya tercakup juga mengenai nuansa-nuansa yang memunculkannya secara historical.

Sejalan dengan makna diskursus yang lebih dari sekedar sebuah kalimat itu, karenanya kalangan ilmuwan jadi banyak yang tertarik untuk mempelajarinya. Disebutkan, kalangan yang tertarik menggarap wacana sebagai obyek studi itu, yaitu kalangan ilmuwan yang berasal dari beragam disiplin ilmu social¹⁰. Dalam kaitan ini, Menurut Stubb (1983) dan van Dijk (1985) sebagaimana dikutip Fairclough¹⁰ *discourse* merupakan sebuah konsep yang digunakan oleh para analis dan teoritis sosial dan para ahli bahasa. Sebagaimana halnya dengan banyak para ahli bahasa, Fairclough sendiri menggunakan konsep *discourse* ini mengacu pada penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Sementara mengenai sejumlah disiplin ilmu social yang tadi disebutkan tertarik terhadap wacana, yakni mencakup : *linguistics, anthropology, sociology, cognitive psychology, social psychology, international relations communication studies and translation studies*. Dalam menelaah wacana, masing-masing ilmuwan mengikuti asumsi, dimensi analisis dan methodology disiplin ilmunya sendiri.¹¹

Namun begitu, ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan *wacana* sebagai sebuah fenomena yang menjadi obyek studi di lingkungan ilmu sosial, yaitu Zellig Harris. Zellig Harris diketahui sebagai orang pertama yang menerbitkan makalah yang bertema *discourse analysis* pada awal tahun 1952. Upaya ini kemudian berlanjut pada munculnya *discourse analysis* sebagai sebuah ilmu, yakni dimasukkan ke dalam ilmu analisis sub bahasa.¹² Dengan demikian, wacana sesungguhnya telah lama dikenal sebagai sebuah jargon dalam ilmu sosial. Namun begitu, wacana kerap terdengar dalam kehidupan hari-hari hanya sebagai sebuah jargon populer.

Sebagai sebuah jargon populer, wacana kerap dikenal dalam pengertian sebagai pengganti kata perbincangan atau pembahasan mengenai suatu obyek. Bahkan sering digunakan sebagai kata yang mengandung arti wawasan.¹³ Dalam khasanah ilmu pengetahuan konsep diskursus memiliki pengertian yang lebih jauh dari pengertian-pengertian populer, dan setiap disiplin ilmu memberikan pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing disiplin ilmu.¹⁴ Hal demikian, misalnya seperti yang diungkapkan James P. Gee¹⁵. Ia membedakan *discourse* ke dalam dua jenis. Pertama, "*discourse*" (d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya ("*on site*")

⁸ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>

⁹ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>

¹⁰ Fairclough, Norman, (1995), *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 54.

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis

¹² Harris et al. (1989) dan Kittredge & Lehrberger (1982), dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis.

¹³ Rusadi, Udi, "Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa", disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

¹⁴ Rusadi, Udi, "Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa", disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

¹⁵ Dalam, Hamad, Ibnu. *Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi Sebuah Telaah Ringkas* cm .www.um .edu .my Hamad 2007.

untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, “*Discourse*” (D besar) yang merangkaikan unsur linguistik pada “*discourse*” (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (*non-language “stuff”*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk *non-language “stuff”* ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponen *non-language “stuff”* itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi, berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikator lainnya dalam mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain.¹⁶ Jadi, dalam pandangan Gee ini, terutama dalam pengertian diskursus yang menggunakan D, relevan dengan asumsi yang dikemukakan berdasarkan pengertian leksikal sebelumnya, bahwa diskursus atau wacana itu tidak hanya sekedar bangunan kalimat atau percakapan belaka, melainkan di dalamnya juga mencakup *nuansa-nuansa* yang memunculkan wacana itu sendiri. Terkait dengan pandangan Gee tadi, maka *nuansa-nuansa* yang dapat disebut sebagai komponen *non-language* itu, diantaranya dapat berupa kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi. Kepentingan mana, kemudian membedakan pewacana dalam caranya beraksi, berinteraksi, berperasaan, atau berpenilaian dalam suatu pewacanaan.

Sehubungan dengan wacana itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak berdiri sendiri, yakni sebagai representasi dari hasil rangkaian proses simultan antara unsur linguistik dan non linguistik, maka dalam pendefinisian wacana di antara sesama ilmuwan menjadi berbeda pandang dalam mengartikan wacana. Selain tentunya ada yang terfokus dalam kaitannya dengan bahasa¹⁷, maka ada pula yang mengartikan diskursus berdasarkan konteks teori dan filosofis. Hal ini, misalnya seperti yang dikemukakan Foucault¹⁸. Menurutnya diskursus (*discourse*) itu merupakan formasi diskursif (*discursive formation*), yaitu sekelompok pernyataan yang memiliki sistem pembentukan yang tunggal. Dengan demikian, Foucault tampak berupaya mensimplikasi apa yang dikemukakan oleh Gee sebelumnya, yakni dengan cara meredusir rangkaian proses simultan antara unsur linguistik dan non linguistik yang merepresentasikan wacana.

Sehubungan wacana itu secara filosofis merupakan sebuah formasi diskursif yang dalam proses pembentukannya bersifat tunggal, itu berarti dalam memahami sebuah wacana tidak cukup hanya dengan melihat *bagian luar* yang nota bene menjadi sebagai salah satu bagian saja dari sebuah ketunggalan¹⁹. Hal yang demikian karena *bagian luar* dimaksud hanyalah baru sebagian saja dari sebuah pewacanaan. Sedang bagian lainnya, seperti dikatakan Gee sebelumnya, yaitu faktor *non-language “stuff”* berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya yang secara teoritis menyebabkan terbedakannya para pewacana itu dalam caranya beraksi, berinteraksi, berperasaan, atau penilaian dalam suatu pewacanaan, belum bisa diketahui. Pemahaman sebuah wacana dengan cara mengabaikan faktor *non-language “stuff”* karenanya dapat menyebabkan kekeliruan. Munculnya kekeliruan, sebab faktor *non-language “stuff”* yang menurut Gee berupa kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi itu tadi, dikatakan Fairclough tidak transparan sifatnya dalam teksasi sebuah pewacanaan sehubungan adanya upaya pengamanan *power* dan *hegemony* dari sang pembuat wacana²⁰ itu sendiri. Sebuah kekeliruan yang di sisi lain, tentunya justru bisa membuat konsumen wacana bisa terpedaya dan jika terus mengabaikan faktor *non-language “stuff”* dalam memahami suatu wacana, maka menurut Luke (1997) itu berarti upaya-upaya penindasan, marjinalisasi yang dilakukan pihak tertentu melalui wacana akan terus berkelanjutan tanpa tantangan.²¹ Karena itu, guna menghambat atau melawannya, maka wacana menurut Luke harus dikritisi.

¹⁶Pandangan Gee ini kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Guy Cook mengenai wacana. Kalau Gee menggunakan konsep *language “on site”* dan *non-language “stuff”*, Guy Cook (dalam, Sobur, 2001:56) memakai konsep teks dan konteks.

¹⁷Misalnya Teun Van Dijk dan termasuk pula M.A.K. Halliday dan termasuk Fairclough.

¹⁸Rusadi, Udi, “Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa”, disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

¹⁹misalnya rangkaian kalimat dalam sebuah pemberitaan surat kabar atau rangkaian kalimat yang muncul dalam suatu percakapan

²⁰Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.

²¹Sebagaimana dikutip McGregor, Sue L.T., dalam, <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>

Dalam pandangan Fairclough, apa yang dimaksudkan Luke itu, dilakukan dengan tujuan untuk membuka kedok atau membongkar asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi dalam kata-kata dari teks tertulis maupun percakapan lisan guna melawan dan menolaknya sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam kaitan itu, Fairclough (1993)²² juga menyebutkan bahwa kritisi wacana ini bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis mengenai hubungan-hubungan semu (buram) yang sering terjadi di antara praktik diskursif, teks dan peristiwa-peristiwa dan struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Upaya kritis yang menurutnya dapat dilakukan dengan metode *Critical Discourse Analysis (CDA)* ini, juga dilakukan dalam rangka usaha untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang tidak transparan itu sebagai sebuah factor dalam upaya mengamankan *power dan hegemony* dari sang pembuat wacana. CDA bertujuan menggali secara sistematis, seringnya hubungan yang kabur antara praktek, teks, peristiwa diskursif dengan struktur, relasi, dan proses sosial budaya yang lebih luas. CDA berusaha untuk menggali bagaimana hubungan non-transparan ini menjadi sebuah faktor dalam mengamankan kekuasaan dan hegemony, dan memberikan perhatian pada keseimbangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, praktek non-demokratis, dan *injustices* lain dengan harapan mendorong masyarakat untuk bertindak korektif. Ada tiga bidang yang menjadi pusat perhatian dari CDA. Wacana yang dibentuk dan dibangun oleh (a) struktur sosial (kelas, status, umur, identitas etnis, dan jenis kelamin) dan oleh (b) budaya. Ekonomi rumah tangga, terdiri dari anggota dari seluruh struktur sosial (tetapi terutama kulit putih, kelas menengah, perempuan), memiliki budaya profesional, yang membentuk dan memaksa wacananya. Apa yang kita katakan sebagai ekonom rumah tangga, dibentuk oleh budaya profesional kami, kehidupan sosial, dan profil anggota (struktur sosial). (c) wacana (kata-kata dan bahasa yang kami gunakan) membantu membentuk dan memaksa identitas, hubungan, dan sistem pengetahuan dan kepercayaan.²³

Dalam hubungan ini, maka Luke berpendapat bahwa CDA terutama dimaksudkan untuk menggambarkan, menafsirkan, menganalisis dan mengeritik kehidupan sosial sebagaimana tercermin dalam suatu teks. Fokus perhatian CDA terletak pada bagaimana hubungan-hubungan sosial, identitas, pengetahuan dan power itu terkonstruksi melalui bahasa (teks) lisan dan tulisan dalam masyarakat, sekolah, media, dan arena politik. Fairclough (2002), Wodak & Ludwig (1999), sebagai dikutip Luke menilai bahwa wacana selalu melibatkan kekuasaan dan ideologi, terhubung dengan konteks masa lampau dan saat ini (nilai sejarah), dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang karena mereka memiliki latar belakang, pengetahuan, dan posisi kekuasaan yang berbeda – karena itu, interpretasi yang ‘benar’ itu tidak ada sedangkan yang mungkin adalah interpretasi yang kurang lebih masuk akal atau cukup dapat diterima.²⁴

Kemudian, dalam hubungan upaya Fairclough²⁵ sebelumnya, karenanya ia mengartikan wacana berdasarkan pembedaan kategori. Dalam pembedaan tersebut, Fairclough membuat dua kategori utama tipe diskursus (*discourses*) yang menjadi unsur pokok dari prosedur diskursus (*order of discourse*), yaitu *genre* dan *discourses*. Diskursus merupakan penggunaan bahasa yang merepresentasikan praktek sosial yang berlaku dari sudut pandang tertentu. Diskursus secara umum berhubungan dengan pengetahuan dan konstruksi pengetahuan. Misalnya praktek sosial politik dibedakan dalam penyajiannya dalam diskursus politik liberal, sosial dan Marxis. Sementara genre merupakan penggunaan bahasa yang berhubungan dengan dan melembaga dalam praktek sosial, misalnya seperti wawancara (*genre interview*) dan komoditi periklanan (*genre periklanan*).

Selanjutnya, menurut Fairclough, analisis terhadap wacana jenis tertentu, termasuk wacana media, melibatkan sebuah selingan antara dua fokus yang serupa dan saling melengkapi, keduanya penting yakni : - peristiwa komunikatif (*communicative event*); -

²²Fairclough, N. (1993). Critical Discourse Analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.

²³Fairclough, N. (2000). *Language and power* (2nd ed.). New York: Longman.

²⁴Luke, A. (1997). Theory and practice in critical science discourse. In L. Saha (Ed.), *International encyclopedia of the sociology of education*. Accessed March 6, 2003. <http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Luke/SAHA6.html>

²⁵Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 dan 76),

susunan wacana (prosedur wacana) (*order of discourse*)²⁶ Tahapan *communicative event* terdiri dari analisis teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna dan dilakukan dengan menganalisis bahasa secara kritis. Analisis *discourse practice* dilakukan pada level proses pembuatan teks yang berguna untuk melakukan penafsiran atas teks dan analisis konsumsi teks. Analisis *sociocultural practice* adalah analisis pada level social (*social analysis*) yang berisikan kajian mengenai keadaan social yang mempengaruhi proses pembuatan teks untuk menjelaskan konteks lahirnya sebuah teks.²⁷

Sedangkan tahapan analisis *order of discourse* atau prosedur wacana, berupaya melihat aspek intertekstualitas dan genre. Intertekstualitas merupakan sebuah istilah di mana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang hadir sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi bagian lainnya. Intertekstualitas dalam berita dapat dideteksi dari pengutipan narasumber, apakah secara langsung atau tidak langsung. Selain intertekstualitas terdapat pula genre. Genre yaitu cara pemakaian bahasa yang biasanya disesuaikan dengan lingkup praktek sosialnya. Oleh karena itu lewat model analisis *order of discourse* ini Fairclough ingin menegaskan bahwa wacana media sesungguhnya adalah suatu bidang yang kompleks. Apa yang muncul dalam teks yang diteliti sesungguhnya adalah bagian akhir dari suatu proses yang kompleks dari berbagai kekuatan, aturan, regulasi dan negosiasi yang menghasilkan fakta tertentu.²⁸

3. Ideologi

Sebagai sebuah konsepsi bagi setiap individu atau kelompok dalam kehidupan sosialnya, maka itu dapat diartikan bahwa ideologi itu dengan sendirinya cenderung menjadi basis bagi individu maupun kelompok dalam berperilaku sosialnya. Atau, meminjam istilah Seliger, ideologi berperan sebagai pembimbing tindakan.²⁹ Perilaku sosial itu sendiri, seperti dikatakan Gramsci (1971:326) sebagaimana dikutip Fairclough³⁰, baik terkait dengan bidang kehidupan seni, hukum, aktifitas ekonomi maupun dalam manifestasi kehidupan individu dan kolektif. Dengan demikian, ideologi itu memang erat dengan tindakan dan ideologi ditentukan dalam konteks efek-efek sosial mereka ketimbang nilai-nilai kebenaran mereka³¹. Ini berarti bahwa aplikasi suatu ideologi cenderung inheren dengan perilaku orang per orang dalam kehidupan rutin berdasarkan pertimbangan efek yang diinginkan ketimbang berdasarkan kebenaran ideologi itu sendiri. Inilah sebabnya kenapa Althusser memaknai ideologi itu sebagai ketidaksadaran yang begitu mendalam (*profoundly unconsciousness*) yang praktiknya dalam diri manusia berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam praktiknya menurut Althusser ideologi itu seringkali disebarkan melalui struktur sosial seperti yang ia sebut sebagai *ideological state apparatus /ISA* dan *repressive state apparatus /RSA* (Althusser, 1994: 151).

RSA lebih menunjuk pada aktor-aktor yang berperan penting menginterpretasikan sekaligus mengaplikasikan ideologi antar sesama manusia. Pada aspek ini, Althusser memandang RSA sebagai pemilik kuasa represif untuk dengan tegas menerapkannya pada setiap warga negara. ISA mengarah pada ideologi itu sendiri yang masuk ke dalam setiap kehidupan manusia. Ideologi ini terangkum dalam aspek keagamaan, pendidikan, hukum, keluarga, politik, komunikasi, serta moralitas.

²⁶Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 .

²⁷Tiamono, Rigakittyndya, 2008, "Analisis Wacana Norman Fairclough", dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkaji dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 151.

²⁸Tiamono, Rigakittyndya, 2008, "Analisis Wacana Norman Fairclough", dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkaji dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 154-155.

²⁹Seliger, dalam John B. Thompson, *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, 2003, Diterjemahkan, Haqqul Yaqin, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 132.

³⁰Fairclough, Norman, 1995, *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.

³¹Lihat, Gramsci, sebagaimana dikutip Fairclough dalam *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.

4. Ideologi dan Media

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, eksistensi suatu teks itu dapat muncul di beragam tempat dan salah satunya di media (baca: surat kabar). Media surat kabar sendiri, sebagai sebuah institusi bisnis, juga sekaligus menjadi sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah struktur dan jenjang yang kemudian menjadi pembeda peran dan fungsi bagi setiap orang yang terdapat dalam struktur organisasi. Di sisi lain, hal itu sekaligus juga menjadi pembentuk bagi munculnya sejumlah komunitas dalam suatu keseluruhan organisasi media. Terkait dengan kategori umum media yang dibagi menurut bidang isi yang dikelolanya, yaitu isi bidang redaksi dan isi bidang perusahaan, maka sejumlah komunitas tadi pada dasarnya menjadi terdiri dari dua bagian besar pula, yaitu sejumlah komunitas yang tergabung dalam struktur organisasi perusahaan dan yang tergabung dalam struktur organisasi bidang redaksi.

Dalam kaitan pernyataan sebelumnya bahwa aplikasi suatu ideologi itu cenderung inheren dengan perilaku orang per orang dalam kehidupan rutinnnya, maka setiap anggota komunitas pada sejumlah komunitas yang ada dalam suatu struktur organisasi media, misalnya seperti struktur organisasi redaksi surat kabar, karenanya menjadi berpeluang untuk mempraktikkan ideologinya masing-masing. Terkait dengan teks media, maka praktik ideologi itu diaplikasikan lewat proses teksasi media itu sendiri melalui masing-masing peran individu dalam struktur organisasi redaksi media. Sementara mengenai pentingnya media bagi ajang praktik terhadap ideologi, maka menurut Althusser (1971, dalam Alzastraouw, 2000), sebagaimana dikutip Sobur (2001:30), itu karena media dianggap strategis dalam bekerja secara ideologis guna terbangunnya kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa. Kelompok berkuasa ini, wujudnya bisa berupa negara, pemilik media ataupun sejenisnya. Jadi, media di sini menjadi alat bagi penguasa untuk mengaplikasikan ideologinya melalui teks media demi terwujudnya kepatuhan khalayak, khususnya menyangkut substansi yang diwacanakan dalam teks. Dengan demikian, antara ideologi dan media sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dalam kaitan proses produksi pesan. Keeratan itu, seperti dikatakan Hall³² yakni berupa melekatnya ideologi dominan dalam proses produksi isi media.

Dengan keeratan hubungan antara ideologi dan media yang seperti itu, dalam kaitan tingkatan pengaruh terhadap isi media yang dimodelkan oleh Shoemaker dan Reese³³, diketahui memang bahwa ideologi menjadi faktor paling dominan jika dibandingkan dengan empat faktor lainnya. Faktor lainnya dimaksud yaitu faktor pada level individu, level rutinitas media, level organisasi dan level ekstramedia.³⁴ Dalam hubungan ini dikatakan bahwa ideologi menjadi faktor pengaruh yang paling menyeluruh dari semua pengaruh yang ada dalam proses mediasi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai individu untuk melihat realita dan bagaimana mereka menghadapinya³⁵

³²Gurevith, Michael, Tony Bennett, James Curran and Woollacott, Culture, Society and The Media. Methuen London and New York, 1982, 263.

³³Shoemaker, Pamela J., Reese dan Reese, Stephen D., 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, NY, Longman Publishers USA, p. 223.

³⁴Faktor pada level individu berartifaktor individu pembuat keputusan dan individu-individu pekerja media yang mempengaruhi produksi isi media. Faktor rutinitas media (*media routines*), yaitu isi media dipengaruhi oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh wartawan sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang), *deadline* atau batas waktu, keterbatasan *space* untuk menyajikan berita, struktur piramida terbalik dalam penulisan berita dan kepercayaan reporter terhadap sumber resmi berita. Faktor organisasi, seperti peranan yang diemban pekerja media, struktur dan bentuk dari organisasi serta pemilik media yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan organisasi media, akan mempengaruhi terhadap produk isi media. Dalam kaitan faktor pengaruh ekstramedia atau pengaruh dari luar organisasi media, Shoemaker dan Reese mengkategorikan lima bentuk *ekstramedia* yang mempengaruhi isi media. Pertama adalah sumber informasi, yaitu mereka yang di observasi atau di wawancara jurnalis. Kedua adalah sumber-sumber pendapatan seperti pemasangan iklan dan khalayak. Ketiga, institusi sosial seperti kalangan bisnis. Keempat pengawasan pemerintah berupa peraturan-peraturan pers. Kelima adalah pasar.

³⁵Terkait dengan ini, Raymond Williams mendefinisikan ideologi sebagai sebuah bentuk relatif formal dan mengartikulasikan sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan, ataupun semacamnya yang diabstraksikan sebagai sebuah "pandangan dunia" atau "pandangan kelas" (Williams, 1977, p 109). Menurut Samuel becker (1984; p 69), ideologi merupakan "cara kita mempersepsi dunia kita dan diri kita; ideologi mengontrol apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang "natural" atau "obvious". "Sebuah ideologi merupakan suatu bentuk setting, diintegrasikan dalam bingkai referensi, di mana di dalamnya melewati

Jika faktor-faktor lain yang sifatnya lebih konkrit, misalnya seperti dari faktor level individual yang diantaranya berbentuk karakteristik pekerja, maka level ideologi itu dengan demikian sifatnya *abstrak*. Meskipun demikian, para akademisi di USA misalnya, maka dalam upayanya mengkonkritkan keabstrakan ideologi, itu dilakukan dengan cara mengenal potensi-potensi dasar yang memunculkan ideologi itu sendiri. Dalam kaitan ini maka yang menjadi potensi dasar bagi munculnya suatu ideologi di USA secara fundamental yaitu berupa kepercayaan akan nilai-nilai sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan pribadi, keuntungan pengusaha, dan pasar bebas (Shoemaker dan Reese, 1996:222). Dengan demikian, keabstrakan suatu ideologi sebenarnya memiliki peluang untuk dapat diidentifikasi menjadi konkrit, dan itu bisa dilakukan melalui upaya pengenalan terhadap potensi-potensi dasar yang memunculkan ideologi itu sendiri.

Sebagai faktor paling dominan dalam proses mediasi, maka dalam perspektif Timur (kritis) karenanya ideologi media tadi menjadi penting untuk diketahui. Dalam pandangan Fairclough, sebagaimana sudah disinggung-singgung sebelumnya, maka kepentingan itu terutama untuk membuka kedok atau membongkar asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi dalam kata-kata dari teks tertulis maupun percakapan lisan guna melawan dan menolaknya sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam hubungan ini maka asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi itu secara teoritis diasumsikan Altschull sebagai ideologi yang merefleksikan ideologi pihak yang membiayai mereka. "..... *media reflect the ideology of those finance them, or "pay the piper."* Demikian Altschull sebagaimana dikutip Shoemaker dan Reese, (1996:231).

Terkait dengan soal pembiayaan tadi maka Altschull (1984, p.254) mengategorikannya menjadi empat yaitu: *Pertama*, di dalam pola yang formal, media dikendalikan oleh Negara, (seperti halnya di banyak negara-negara komunis). *Kedua*, di dalam pola komersial, media merefleksikan ideologi para pengiklan dan pemilik media. *Ketiga*, di bawah pola kepentingan atau *interest*, isi media merefleksikan ideologi kelompok finansial yang membiayai media, misalnya seperti partai politik atau kelompok keagamaan. *Keempat* di dalam pola yang informal, isi media merefleksikan tujuan para individu kontributor yang ingin mempromosikan pandangan-pandangan mereka (Shoemaker, Pamela J dan Reese, Stephen D., 1996: 231). Dengan demikian, ideologi media pada dasarnya berbasis pada soal pembiayaan operasionalisasi media yang berdasarkan sumbernya diidentifikasi bervariasi pada empat pola yang terdiri dari pola formal (merefleksikan negara), komersial (merefleksikan pengiklan dan pemilik media), kepentingan (*interest*) (merefleksikan kepentingan partai politik atau kelompok keagamaan), dan informal (merefleksikan kontributor).

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing, yang berupaya melihat konstruksi realitas kepentingan publik yang dibangun oleh media online yang dimiliki Humas Pemerintah, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam kelompok penelitian dengan paradigma interpretif pada jenis paradigma penelitian konstruktivisme.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing yang memfokuskan diri pada konstruksi realitas wartawan menyangkut pemberitaan di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Hal ini diantaranya menyangkut masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta, pelayanan kesehatan; dan masalah banjir. Konstruksi realitas yang menjadi objek yaitu pemberitaan wartawan melalui website beritajakarta.com.

Framing sendiri merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Untuk kepentingan ini maka Analisis framing yang dipakai yaitu model analisis Gamson dan Modigliani. Selain itu, guna efektifitas penggunaan model analisis dimaksud, maka dalam penerapannya dilakukan dengan bantuan model pemahaman. Dilthey yang berbasis author dalam memahami teks (dalam. Radford : 2005).

Teknik yang digunakan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada rumusan model Gamson dan Modigliani³⁶ yang didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media informasi dari website yang terdiri atas *package* interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu.

C. Penyajian dan Analisis Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah riset ini sebelumnya, riset tersebut mencoba menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara yang dalam hal ini wartawan Humas Pemda DKI, melalui pewacanaan mereka dalam konstruksi realitas mengenai lingkungan pemerintahan DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Pemaparan dalam bagaian ini sendiri dibagi menurut : Konstruksi Realitas **website beritajakarta.com** Mengenai Lingkungan Pemerintahan DKI; *Frame* Kepentingan Pemerintah Versus Kepentingan Publik ; Dominasi Kepentingan Pemerintah (Pemprov DKI) atas Kepentingan Publik; Representasi ideologi aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI).

1. Konstruksi Realitas [website beritajakarta.com](http://beritajakarta.com) Mengenai Lingkungan Pemerintahan DKI

Website beritajakarta.com memberitakan masalah lingkungan pemerintahan DKI Jakarta antara tanggal 1 Agustus 2012 hingga 5 Desember 2012. Total peng-*upload*-an berita dalam kurun waktu tersebut sebanyak 12 kali. Dari total pemberitaan ini, maka realitas yang dikonstruksi wartawan terlihat lebih banyak (8) yang sifatnya menyangkut kepentingan publik yang sumbernya berasal dari arus atas (*Top down*). Sementara yang sifatnya menyangkut kepentingan publik yang sumbernya berasal dari kalangan arus bawah (*grassroot*) sebanyak empat (4) kali.

Terhadap ragam realitas tadi, kalangan wartawan [website beritajakarta.com](http://beritajakarta.com) , secara subjektive tentunya memiliki cara-caranya sendiri dalam mengkonstruksikannya melalui pemberitaan. Namun demikian, dari frame-frame-nya mengindikasikan bahwa wartawan dalam konstruksinya itu cenderung tetap berpihak kepada publik dalam mengkonstruksi realitas menyangkut lingkungan Pemda DKI tersebut. Yang membedakannya hanya sumber asal masalah lingkungan itu, yakni lebih banyak berasal dari kalangan atas (Top Down) ketimbang dari kalangan bawah (*bottom up*) itu sendiri. Artinya, dalam kaitan pengkonstruksian realitas menyangkut lingkungan Pemda DKI itu, wartawan tampak lebih banyak menyuarakan kepentingan kalangan atas yang dalam hal ini pihak Pemprov DKI daripada kalangan bawah atau publik/warga DKI itu sendiri.

Dari hasil analisis terhadap konstruksi realitas wartawan dalam pemberitaan melalui perangkat analisis Model *Framing* Gamson dan Modigliani sendiri, berhasil ditemukan 12 frame. Dari sini pula diketahui wacana yang diusungoleh para aparaturnya itu serta tipologi ideologi yang melekat di dalamnya.

Hasil penelitian selengkapnyanya selanjutnya disajikan melalui tabel-tabel berikut.: Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, [website beritajakarta.com](http://beritajakarta.com) memediakan berita menyangkut lingkungan Pemda DKI selama kurun waktu 1 Agustus 2012 - 5 Desember 2012 menyangkut berbagai masalah, tidak terkonsentrasi pada satu masalah kepentingan publik saja. Dari ragam masalah kepentingan publik dimaksud, maka konstruksinya tentunya menjadi 12 bentuk konstruksi. Hasilnya disummary menjadi sebagai berikut :

³⁶ Gamson dan Modigliani mendefinisikan frame sebagai pusat mengorganisasikan gagasan atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut *package*. *Framing analysis* yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami wacana media sebagai suatu gugusan perspektif interpretasi (*interpretative package*) saat mengkonstruksi dan memberi makna suatu isu. (Sobur, 2004:177).

1. Konstruksi Wartawan tentang realitas Dalam Pemberitaan
Tabel 1
Konstruksi Wartawan

Judul Berita	Sumber	Frame	Wacana	Ideologi
e. DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun	website beritajakarta.com, 01-08-2012	Pemprov DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun.	Wajib Belajar 12 Tahun	Pro Pemerintah (Government).
b. : Warga Nikmati Layanan Kesehatan Gratis	website beritajakarta.com, 18-09-2012	Pemprov DKI berikan layanan kesehatan gratis.	Layanan Kesehatan Gratis	Pro Pemerintah (Government).
c. <i>Contra Flow</i> di Jl Yos Sudarso Efektif Cairkan Lalin	(website beritajakarta.com, 22-09-2012)	Satlantas Atasi Kepadatan lalulintas dengan Strategi Contra Flow	Solusi kepadatan lalulintas	Pro Pemerintah (Government)
d. Relokasi Sekolah Bukan Solusi Atasi Tawuran	(website beritajakarta.com, 25-09-2012)	Pemda DKI dan DPRD DKI bahas solusi Tawuran Pelajar Di Jakarta	Solusi tawuran Pelajar	Pro Pemerintah (Government)
e. 2013, Dinkes Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap	(website beritajakarta.com, 27-09-2012)	Pemda DKI Rencanakan Tambah Puskesmas Berfasilitas Rawat Inap	Penambahan Puskesmas berfasilitas rawat inap	Pro Pemerintah (Government.)
f. DPRD: Stop Kegiatan MOS di Sekolah	(website beritajakarta.com, 28-09-2012)	Pemprov DKI dan DPRD DKI Bentuk Tim Khusus Tangani Tawuran Pelajar	Penyetopan kegiatan MOS	Pro Pemerintah (Government.)
g. Besok, KRL Khusus Wanita Beroperasi	(website beritajakarta.com, 30-09-2012)	Kaum Wanita Diperlakukan Istimewa oleh PT KAI	Pengistimewasan Kaum Wanita/emansipasi wanita	Pro Pemerintah (Government.)
h. Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir Terjamin	(website beritajakarta.com, 06-11-2012)	Pemprov DKI Jamin Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir	Pemprov DKI Peduli korban banjir	Pro Pemerintah (Government).
i. 514 Warga Tambora Terima Kartu Jakarta Sehat	(website beritajakarta.com, 10-11-2012)	Pemkot DKI Bagikan Kartu Jakarta Sehat.	Pemda DKI Peduli Kesehatan warga	Pro Pemerintah (Government.)
j. Ribuan Sayuran Mati Terendam Air	(website beritajakarta.com, 05-12-2012)	Petani Sayur di Jakarta Keluhkan Banjir	Derita petani sayur Jakarta akibat banjir	Pro publik (Governance)

k. Kali Cakunglamba Meluap, Puluhan Rumah Tergenang	(website beritajakarta.com, 06-12-2012)	Luapan Kali Banjiri Puluhan Rumah	Disfungsi nalisasi Saluran air sebabkan banjir	Pro publik (Governance)
l. Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 Picu Kemacetan	(website beritajakarta.com, 4 -12-2012)	Kecewaaan Warga terhadap keberadaan putaran dikolong tol JORR W1	Kesemraw utan lalu lintas	Pro publik (Governance)

2. *Frame* Kepentingan Pemerintah Versus Kepentingan Publik (**Tema Minor (Frame), Wacana, Kepentingan Wacana dan Ideologi Wartawan dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com**

Untuk mengetahui kecenderungan wartawan dalam pewartawannya melalui *frame-frame* menyangkut masalah-masalah lingkungan (*environment*) Pemda DKI Jakarta, ini dapat dilihat dari tema-tema minor yang mereka munculkan dalam *frame-frame* yang terbentuk melalui hasil konstruksi realitas mereka dalam pemberitaan. Guna maksud tersebut, maka **langkah pertama** yang ditempuh adalah dengan cara mengidentifikasi tema-tema minor yang muncul dalam *frame-frame* yang dibentuk wartawan melalui konstruksi-konstruksi mereka atas suatu realitas. Lalu **langkah kedua**, mengidentifikasi wacana yang muncul dalam *frame-frame* yang dibentuk wartawan melalui konstruksi-konstruksi mereka atas suatu realitas. **Langkah ketiga**, yaitu mengidentifikasi deology yang melekat dalam wacana yang mereka kemukakan melalui konstruksi realitas mengenai berbagai masalah lingkungan (*environment*) Pemda DKI.

Guna menjawab masalah tersebut, pemaparannya akan dilakukan dalam sub bab ini. Pemaparan langkah-langkah tadi dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel 1 sebagai berikut melalui pembagian sub bab berikut : a) Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah Dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com; b) Kepentingan (*interest*) Pemerintah (Pemprov DKI) Versus Kepentingan (*interest*) Publik; c) Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan(*environment*) Pemda DKI dalam **website beritajakarta.com**.

Tabel 2
Tema Minor (Frame), Wacana, Kepentingan Wacana dan Ideologi Wartawan dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com

Nomor;Berita; Judul; Edisi	Tema Minor/Frame beritajakarta.com	Wacana	Wacana terkait dengan Kepentingan			Ideologi	
			Pemerintah		Warga DKI Jakarta	Gover-nance	Gover-ment
			Pemkot DKI Jakarta	Institusi Pemerintah lainnya			
1. Judul: DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun (website beritajakarta.com, 01-08-2012)	Pemprov DKI Bagikan Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun	1) Waji Belajar 12 Tahun	V				V

2. Judul: Warga Nikmati Layanan Kesehatan Gratis (Bottom up) (website beritajakarta.com, 18-09-2012)	Pemprov DKI berikan warga layanan kesehatan gratis.	2) Layanan Kesehatan Gratis	V			V	
3. Judul: Contra Flow di Jl Yos Sudarso Efektif Cairkan Lalin (website beritajakarta.com, 22-09-2012) Top down	Satlantas Atasi Kepadatan lalu lintas dengan Strategi <i>Contra Flow</i>	3) Solusi kepadatan lalulintas		V			V
4. Judul: Relokasi Sekolah Bukan Solusi Atasi Tawuran (Top down) (website beritajakarta.com, 25-09-2012)	Pemda DKI dan DPRD DKI bahas solusi Tawuran Pelajar di Jakarta	4) Solusi tawuran Pelajar.	V				V
5. Judul : 2013, Dinkes Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap (website beritajakarta.com, 27-09-2012) top down	Pemda DKI Rencanakan Tambah Puskesmas Berfasilisas Rawat Inap	5) Penambahan Puskesmas berfasilitas rawat inap	V				V
6. Judul: DPRD: Stop Kegiatan MOS di Sekolah (website beritajakarta.com, 28-09-2012)	Pemprov DKI dan DPRD DKI Bentuk Tim Khusus Tangani Tawuran Pelajar	6) Penyetopan kegiatan MOS	V				V
7. Judul: Besok, KRL Khusus Wanita Beroperasi (Top down) (website beritajakarta.com, 30-09-2012)	Kaum Wanita Diperlakukan Istimewa oleh PT KAI	7) Pengistimewaan Kaum Wanita/eman sipasi wanita		V			V
8. Judul: Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir Terjamin (Top down) (website beritajakarta.com, 06-11-2012)	Pemprov DKI Jamin Kebutuhan Air Bersih Korban Banjir	8) Pemprov DKI Peduli korban banjir	V				V
9. Judul : 514 Warga Tambora Terima Kartu Jakar-ta Sehat (website beritajakarta.com, 10-11-2012) top down	Pemkot DKI Bagikan Kartu Jakarta Sehat	9) Pemda DKI Peduli Kesehatan warga	V				V

10. Judul : Judul : Ribuan Sayuran Mati Terendam Air (website beritajakarta.com, 05-12-2012) Bottom up	Petani Sayur di Jakarta Keluhkan Banjir	10) Derita petani sayur Jakarta akibat banjir			V	V	
11. Judul : Kali Cakunglana Meluap, Puluhan Rumah Tergenang (website beritajakarta.com, 06-12-2012) bottom up	Luapan Kali Banjiri Puluhan Rumah	11) Disfungsionalisasi Saluran air sebabkan banjir			V	V	
12. Judul : Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 Picu Kemacetan (website beritajakarta.com, 4 -12-2012)	Kekecewaan Warga terhadap keberadaan putaran di kolong tol JORR W1	12) Kesemrawutan lalu lintas	7 (tujuh)	2 (dua)	3 (tiga) V	V	

a. Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com

Mengacu pada sekumpulan wacana yang muncul dari tema-tema minor seperti terlihat dalam tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pihak yang paling kerap dimunculkan sebagai wacana oleh wartawan yaitu pihak Pemprov DKI (7 kali). Dari kekerapan ini, sosok pihak Pemprov DKI pewacanaannya dimunculkan wartawan dari beragam realitas. Pertama kali, pewacanaan Pemprov DKI muncul melalui realitas pembagian Kartu Gratis Wajib Belajar 12 Tahun. Di sini, pihak Pemprov DKI diwacanakan sebagai pihak yang peduli kepada masalah pendidikan rakyat (positiv). Pewacanaan Pemprov DKI kemudian muncul melalui realitas ‘layanan kesehatan gratis’. Di sini pun pihak Pemprov DKI diwacanakan sebagai pihak yang peduli terhadap masalah kesehatan warga tak mampu (positive).

Pewacanaan berikut dimunculkan wartawan melalui konstruksi realitas tentang masalah ‘tawuran Pelajar di Jakarta’. Di sini pihak Pemprov. DKI diwacanakan sebagai pihak yang tidak “tinggal diam” dalam mengatasi masalah tawuran di kalangan pelajar di DKI. (positiv). Begitu pula pada konstruksi realitas menyangkut ‘Rencana penambahan Puskesmas Berfasilitas Rawat Inap di DKI’, pihak Pemprov DKI juga diwacanakan sebagai pihak yang peduli terhadap masalah kesejahteraan masyarakat (positiv).

Kemudian, wartawan beranjak kepada realitas lain, yaitu menyagkut realitas pasca banjir. Melalui konstruksi realitasnya, dari *frame*-nya wartawan tampak berupaya membangun wacana bahwa pihak Pemprov DKI sebagai pihak “yang baik hati” dan bertanggung jawab terhadap warganya yang terkena musibah banjir dengan cara menjamin terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih warga Korban Banjir (positiv).

Pada edisi berikutnya, tampak wartawan kembali mengangkat realitas 'kesehatan masyarakat, yakni pembagian kartu sehat' sebagai objek konstruksinya. Untuk itu, maka di sini wartawan mencoba membangun wacana bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang mempedulikan masalah kesejahteraan masyarakat di bidang kehidupan kesehatan. Jadi, pihak Pemprov tetap diwacanakan secara positif.

Meskipun wartawan tampak lebih banyak memosisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang positif dalam konstruksi realitasnya menyangkut masalah realitas di lingkungan Pemda DKI, namun tidak berarti mereka itu secara 'melulu' mewacanakan pihak Pemprov DKI dalam konstruksi realitasnya. Akan tetapi, mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memosisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewartawannya. Pihak-pihak dimaksud yaitu pihak pemerintah juga, namun instansi pemerintah yang sifatnya non Pemprov DKI Jakarta. Pihak-pihak dimaksud yaitu seperti Pihak Satlantas Jakarta Utara. Pewartawanan pihak tersebut muncul melalui '*Frame*: Satlantas Atasi Kepadatan lalu lintas dengan Strategi *Contra Flow*'. Pihak Satlantas sendiri dalam pewartawanan itu, diposisikan sebagai pihak yang positif. Wacananya sendiri berupa wacana "Solusi kepadatan lalu lintas".

Selain pihak Satlantas, maka pihak pemerintah lainnya yang turut diwacanakan adalah Pihak PT KAI, sebuah perusahaan BUMN di bawah naungan Kementerian Perhubungan RI. Dalam pewartawanan, pihak ini dimunculkan wartawan melalui konstruksi realitas wartawan mengenai 'beroperasinya KRL Khusus Wanita'. Dengan *frame* bahwa 'Kaum Wanita Diperlakukan Istimewa oleh PT KAI', maka di sini, melalui wacana yang coba mereka munculkan, bahwa 'PT KAI istimewa wanita dalam bertransportasi', terlihat pihak PT KAI diposisikan juga sebagai pihak yang positif dalam hal 'memperlakukan kaum perempuan'.

Jika sebelumnya sudah dipaparkan temuan-temuan menyangkut posisi pihak-pihak pemerintah dalam pewartawanan melalui konstruksi wartawan mengenai realitas berbagai masalah menyangkut lingkungan Pemda DKI, maka temuan lainnya juga memperlihatkan adanya beberapa pemosisian pihak publik (warga) dalam pewartawanan wartawan.

Pemosisian pertama pihak publik/warga dalam pewartawanan, pertama kali dimunculkan wartawan melalui konstruksi realitas mereka mengenai 'matinya sayur karena terendam air banjir'. Konstruksi realitas tersebut mereka lakukan melalui pemberitaan berjudul 'Ribuan Sayuran Mati Terendam Air', website beritajakarta.com, 05-12-2012. Dengan konstruksi ini *frame* yang dimunculkan yaitu 'Petani Sayur di Jakarta Keluhkan Banjir'. Lalu, dari *frame* tersebut pihak publik/warga diwacanakan sebagai pihak yang menjadi korban dalam realitas tersebut. Wacananya sendiri berupa '**Derita petani sayur Jakarta akibat banjir**'.

Wacana lain yang dimunculkan wartawan menyangkut pihak publik/warga tersebut, yaitu wacana yang dimunculkan melalui konstruksi realitas mereka mengenai 'keberadaan Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 yang memacetkan'. Realitas ini sendiri mereka konstruksikan melalui pemberitaan berjudul 'Putaran Di Kolong Tol Jorr W1 Picu Kemacetan' (website beritajakarta.com, 4-12-2012).

Berdasarkan konstruksi mereka, terlihat *frame*-nya berupa "Kekecewaan Warga terhadap keberadaan putaran di kolong tol JORR W1". Dari *frame* tersebut, terlihat mereka berupaya mewacanakan pihak publik/warga pemanfaat lalu lintas itu sebagai pihak yang berposisi tidak menguntungkan atau jadi korban akibat keberadaan putaran di kolong tol JORR W1 itu. Wacananya sendiri berupa, "Kesemrawutan lalu lintas".

Kemudian, wacana terakhir yang dimunculkan wartawan menyangkut pihak publik/warga tersebut, yaitu wacana yang dimunculkan melalui

konstruksi realitas mereka mengenai ‘Luapan Kali Cakunglana yang membanjiri Puluhan Rumah’. Wacananya sendiri berupa “Disfungsionalisasi Saluran air sebabkan banjir”. Jadi di sini, dengan pewacanaan tersebut, kepentingan pihak publik/warga, cenderung “disuarakan” sendiri oleh wartawan, bukan “disuarakan” oleh publik/warga yang dimediasi oleh wartawan melalui konstruksi realitas yang ia buat dalam pemberitaan.

b. Kepentingan (*interest*) Pemerintah (Pemprov DKI) versus Kepentingan (*interest*) Publik

Mengacu pada hasil analisis sebelumnya menyangkut arah pewacanaan wartawan sebagaimana tampak dalam format-format frame yang terbangun melalui konstruksinya mengenai berbagai realitas kepentingan publik, dengan mana memperlihatkan adanya keberagaman pihak-pihak yang mereka wacanakan, yakni bukan hanya pihak Pemprov DKI, maka ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Althusser (2004:47). bahwa watak dasar manusia itu adalah sebagai binatang ideology, menjadi benar adanya. Status binatang ideology sebagai mana disandang wartawan atau awak media ([website beritajakarta.com](http://website.beritajakarta.com)), dalam pandangan Althusser, ideology yang diembannya itu diartikan sebagai ketidaksadaran yang begitu mendalam (*profoundly unconsciousness*) yang dalam praktiknya dalam diri manusia berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. (Althusser, 1994: 151). Dalam kaitan rutinitas wartawan atau awak media seperti [website beritajakarta.com](http://website.beritajakarta.com), keberlangsungannya tentu persis seperti apa yang digambarkan oleh Althusser tadi. Dalam keadaan seperti itu, makanya para wartawan itu dalam mengkonstruksi realitas mengenai kepentingan publik, temuan penelitian menunjukkan tidak hanya pihak Pemprov DKI saja yang mereka wacanakan, namun termasuk pula pihak-pihak yang bukan pihak Pemprov DKI, seperti pihak Satlantas Polri, PT KAI dan pihak publik/warga DKI.

Lebih jauh, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, di mana pihak Pemprov DKI (Pemerintah) sendiri terlihat menjadi pihak yang paling **dominan** dimunculkan wartawan dalam pewacanaan mereka secara positif. Dilihat dari sini, maka ini dapat diartikan bahwa pihak media terindikasi pula sebagai pihak yang memainkan fungsinya secara ideal. Disebut ideal karena para awak media [website beritajakarta.com](http://website.beritajakarta.com) itu memang merupakan bagian dari bentuk *ideologicalstateapparatus* /ISA sebagaimana dimaksudkan oleh Althusser³⁷.

Dengan memainkan fungsinya secara ideal itu, maka pihak awak media di sini, berdasarkan pandangan Sam Black³⁸ menyangkut fungsi humas pemerintah, mereka berarti telah mewujudkan dua dari empat tujuan Humas Pemerintah itu sendiri, yaitu menyangkut tujuan : 1). *To keep citizens informed of the council's policy and its day-by-day activities* (memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatannya sehari-hari); dan 3). *To enlighten citizens on the way in which the systems of local government works and inform them of their rights and responsibilities* (memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka).

Seiring dengan berjalannya dua tujuan Humas Pemerintah tadi, maka terkait pendapat Eriyanto (Eriyanto, 2002 : 167) yang mengutip pendapat Edelman mengenai pentingnya peranan bahasa dalam pembentukan sebuah citra, maka temuan penelitian ini yang menunjukkan begitu dominannya pihak

³⁷Althusser melihat bahwa ideology seringkali disebarkan oleh struktur sosial seperti yang ia sebut sebagai *ideologicalstateapparatus* /ISA dan *repressive state apparatus*/RSA (Althusser, 1994: 151). Dalam kaitan pendapat Althusser yang menilai bahwa media juga merupakan bentuk dari ISA tadi, itu berarti media di sini bisa menjadi “badan ideologis” yang dapat digunakan sebagai alat praktek ideologis oleh para pihak ISA.

³⁸ Onong Uchjana Effendy. Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis, Remaja Rosdakarya Bandung, 2002, h. 37

Pemprov DKI muncul dalam pewacanaan secara positif, dengan sendirinya pewacanaan ini bertendensi akan dapat membentuk citra positif Pemprov DKI dalam kaitan realitas kepentingan publik di wilayah DKI Jakarta.

Jika sebelumnya telah ditunjukkan bahwa wartawan dalam konstruksinya itu lebih dominan mewacanakan pihak Pemprov DKI secara positif, di sisi lain pihak wartawan tampak juga berupaya mewacanakan pihak-pihak lain di luar pihak Pemprov DKI, yang sifatnya juga cenderung positif. Ini dialami oleh pihak Polri cq pihak Satlantas Pemkot Jakarta Utara. Termasuk pula di sini dialami pihak PT KAI. Keduanya termasuk pihak yang diuntungkan oleh pihak wartawan dalam pewacanaan media sehubungan pihak wartawan tanpa sadar terjebak memainkan fungsi yang dalam bahasa Althusser tadi disebut sebagai “binatang ideologis”.

Selanjutnya, jika ditelaah menyangkut kepentingan publik/warga sendiri, dari temuan penelitian menunjukkan bahwa kalangan wartawan tampak memarginalisir kalangan publik/warga Jakarta dalam pewacanaannya. Indikasi marginalisasi itu terlihat dari begitu sedikitnya kalangan warga/publik dimunculkan dalam pewacanaan wartawan. Tercatat, kalangan warga/publik ini hanya dimunculkan wartawan dua kali dalam pewacanaan. Pertama pada konstruksi realitas menyangkut realitas ‘Derita yang dialami petani sayur Di DKI Jakarta’ dan kedua pada realitas menyangkut ‘Luapan Kali Cakungluma yang banjir Puluhan Rumah warga’. Jadi, dengan minimnya pewacanaan pihak publik/warga ini dalam pewacanaan wartawan melalui konstruksi realitas menyangkut masalah ‘kepentingan publik’, dengan sendirinya ini membuktikan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan menyangkut masalah-masalah lingkungan Pemda DKI itu, pihak wartawan berindikasi cenderung lebih berpihak kepada pihak Pemprov DKI itu sendiri sebagai “tuannya”.

c. Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.

“Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).” – UNESCAP, 2013. Tata kelola (*governance*) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan tersebut akan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan). (<http://indowhiz.blogspot.com/2013/02/konsep-government-pemerintah>, diakses 17 April pk 15.00).

Dari segi administrasi pembangunan, *good governance* didefinisikan sebagai berikut: *An overall institutional framework within which its citizens are allowed to interact and transact freely, at different levels, to fulfil its political, economic and social aspirations. Basically, good governance has three aspects: (i) The ability of citizens to express views and access decision making freely (kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan pandangan dan mengakses kebijakan pemerintah secara lebih bebas/mudah) ; (ii) The capacity of the government agencies (both political and bureaucratic) to translate these views into realistic plans and to implement them cost effectively (kapasitas agen pemerintah (baik politik dan birokrasi) untuk menerjemahkan pandangan mereka menjadi rencana yang sesuai dengan kenyataan dan mengimplementasikannya secara efektif (dari sisi biaya); and; (iii) The ability of citizens and institutions to compare what has been asked for with what has been planned, and to compare what has been planned with what has been implemented” (kemampuan masyarakat dan institusi untuk membandingkan antara apa yang diharapkan dengan apa yang direncanakan, dan kemudian membandingkannya dengan apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dilaksanakan). (lihat : <http://lawyersinbali.wordpress.com/2011/04/27/pengertian-good-governance/>, diakses 17 April 14*

jam 14.00. Dengan demikian, secara mendasar *good governance* itu mencakup tiga aspek.

Lebih jauh, sebagaimana sudah disinggung di bagian awal tesis ini, konsep *governance* lebih melihat kegiatan, proses atau *kualitas memerintah*, bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan kebijakan itu. Kebijakan bukan dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok tertentu melainkan muncul dari proses konsultasi antara berbagai pihak yang terkena oleh kebijakan itu (Oyugi, 2000: 30-31). Dengan begitu, berarti prinsip *bottom up* jadi sangat diutamakan dalam aplikasi konsep *governance*.

Dalam konsep ini, sejalan dengan makna *bottom up* tadi, maka pemerintah jadi bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, maka dalam hubungan ini *governance* melibatkan relasi antara berbagai kekuatan dalam negara, yakni pemerintah (*state*), *civil society*, *economic society*, dan *political society* (Corbett 2000: 23-27; Keating, 1999: 40-43).

Sementara itu, konsep *Government* memiliki makna berbeda dengan *Governance*. Konsep *Government* diantaranya didefinisikan bahwa “*Government is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.*” – Business Dictionary, 2013. Pemerintah (*Government*) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Yang menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara. (<http://indowhiz.blogspot.com/2013/02/konsep-government-pemerintah>, diakses 17 April pk 15.00).

Dengan membandingkan dua konsep sebelumnya, maka terlihat perbedaan yang sangat kontras diantara kedua konsep, perbedaan itu terutama terletak pada orientasi yang mendasari terselenggarakannya pemerintahan itu. Jika pada konsep *Governance* cenderung lebih didasari oleh prinsip kebersamaan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam konsep *Government* lebih didasarkan pada prinsip ketunggalan, yaitu organisasi pemerintahan sebagai pemangku tunggal penyelenggara pemerintahan.

Bertolak dari argumentasi sebelumnya menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, maka jika dikaitkan dengan temuan penelitian ini sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1 sebelumnya, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya secara relatif lebih merepresentasikan ideologi *government* (8) dari pada ideologi yang *Governance* (4).

Mengacu pada temuan di atas maka dengan mengaitkannya pada pendapat (Althuser; 2004: 48) bahwa aparatur media itu katanya tidak beda halnya dengan manusia lain, yakni mempunyai watak dasar, dengan mana watak dasar manusia itu sendiri sebagai binatang ideology (Althuser; 2004: 48), maka kecurigaan terhadap aparatur negara yang bekerja di media pemerintah seperti website beritajakarta.com milik Pemda DKI dalam iklim pemerintahan yang *Governance* saat ini, kiranya sudah terjawab kini.

Kecurigaan awal tesis ini sendiri yaitu, bahwa dalam iklim *Governance* saat ini, wartawan aparatur negara pada **Website beritajakarta.com** akan kesulitan dalam menuaikan tugasnya sebagai wartawan dalam hubungan ‘penuaian’ kepentingan. Kesulitan ‘penuaian’ itu yaitu berupa ‘tarik-menarik’ antara menuaikan kepentingan Pemerintah atau kepentingan warga/publik. Dengan mengacu pada temuan penelitian ini sendiri, ternyata menunjukkan

bahwa bandul *power of interest* itu ternyata lebih mengarah pada upaya merepresentasikan ideologi *government* dari pada ideologi *Governance* yang lebih 'memfasilitasi' warga dalam berjalannya operasi pemerintahan.

Dengan begitu, ini tentu dapat pula diartikan bahwa Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya cenderung lebih diwarnai oleh ideologi yang bersifat *government*. Ideologi yang demikian tentunya jadi kurang sesuai dengan harapan pemerintah dalam konteks konsep *Governance* yang nota bene telah diimplementasikan oleh pihak BAPPENAS sebelumnya. Dalam konteks tersebut, aplikasinya seperti sebagaimana dikatakan oleh pihak Bappenas sebelumnya yakni terdiri dari : 1) Transparansi (*Openness and Transparency*); 2) Partisipasi Masyarakat (*Participation*); 3) Akuntabilitas/Tanggung Gugat (*Accountability*); 4) Supremasi Hukum (*Rule of Law*). (Bapenas, 2008: 15). Keempat prinsip tersebutlah yang oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS disebut dengan "*More Administrative Good Governance*".

III. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini pada dasarnya berupaya menemukan ideologi yang direpresentasikan aparat negara (wartawan Humas Pemda DKI) melalui konstruksi realitasnya mengenai Lingkungan Pemda DKI dalam pemberitaan di Website beritajakarta.com. Dari hasil analisis terkait dengan "Tema Minor (*frame*) dan Wacana Aparatur Pemerintah Dalam Pemberitaan Lingkungan Pemda DKI pada website beritajakarta.com" dapat disimpulkan bahwa meskipun wartawan tampak lebih banyak memposisikan pihak Pemprov DKI sebagai pihak yang 'positif' dalam konstruksi realitasnya menyangkut masalah realitas di lingkungan Pemda DKI, namun mereka sekali-sekali terlihat juga berupaya memposisikan pihak-pihak di luar Pemprov DKI dalam pewartawannya. Kemudian terkait dengan "Kepentingan (*interest*) Pemerintah (Pemprov DKI) versus Kepentingan (*interest*) Publik", dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi realitas wartawan menyangkut masalah-masalah lingkungan Pemda DKI itu, pihak wartawan berindikasi cenderung lebih berpihak kepada kepentingan pihak Pemprov DKI itu sendiri sebagai "tuannya". Kemudian terkait dengan "Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com.", maka bertolak dari argumentasi menyangkut konsep *Governance* dan *Government*, kiranya dapat diidentifikasi dan dimaknai bahwa : Ideologi Aparatur di balik pemberitaan mengenai Lingkungan (*environment*) Pemda DKI dalam website beritajakarta.com. itu, tampaknya secara relatif lebih merepresentasikan ideologi *government* (8) dari pada ideologi yang *Governance* (4). Dengan demikian, ideologi yang dominan di balik pemberitaan di website beritajakarta.com. itu adalah ideologi yang berifat *Government*. Jadi, wartawan aparat negara tampaknya cenderung lebih mementingkan *interest* pihak Pemda DKI dari pada pihak warga/publik DKI Jakarta dalam aktifitas pemberitaannya di website beritajakarta.com.

Secara praktis, maka berdasarkan temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa pihak aparat negara dalam aktifitas kewartawanannya cenderung masih berpihak kepada pihak pemerintah, kiranya ini menjadi tidak ideal di tengah-tengah iklim pemerintahan yang '*Governance*' yang nota bene kini sedang digalak-galakkan pemerintah. Bagi para pihak aparat negara dan utamanya aparat negara yang memainkan fungsi wartawan di website beritajakarta.com, kiranya ini menjadi masukan penting dalam rangka memperbaiki kualitas wartawan dalam era pemerintahan yang '*Governance*'.

Sementara secara akademis, sehubungan dengan kelemahan penelitian ini yang tidak didukung oleh aktifitas wawancara mendalam terhadap subyek penelitian, dan di samping juga tidak dilakukannya suatu studi sejarah dan dokumentasi terkait dengan subyek penelitian dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, utamanya terkait dengan konsep *government* dan *governance*, maka bagi para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis di masa mendatang, hendaknya penelitian itu dilakukan dengan mengisi kekurangan-kekurangan yang tidak dilakukan dalam penelitian ini. Dengan melakukan itu tentunya diharapkan bahwa unsur-unsur 'how' dan 'why' terkait ideologi aparat negara tadi dapat terungkap dalam penelitian itu.

Ucapan terimakasih : Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada tim redaksi atas dimuatnya KTI ini pada JSKM edisi 21 (2) tahun 2017.

Daftar Pustaka

- Althusser, Louis, *Tentang Ideologi :MarxismeStrukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, 2008, Bandung, Jalasutra.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.187
- Fairclough, Norman, 1995, *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.
- Gamson, William A. *Media Discourse as a Framing Resource*: dalam Ann N. Crigler (ed) *The Psychology of Political Communication*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1996
- Gurevith, Michael, Tony Bennett, James Curran and Woollacott, *Culture, Society and The Media*. Methuen London and New York, 1982, 263.
- Hamad, Ibnu. *Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi Sebuah Telaah Ringkas* www.um.edu.my Hamad 2007.
- Harris et al. (1989) dan Kittredge & Lehrberger (1982), dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/ Discourse_ analisis](http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analisis).
- Luke, A. (1997). Theory and practice in critical science discourse. In L. Saha (Ed.), *International encyclopedia of the sociology of education*. Accessed March 6, 2003. <http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Luke/SAHA6.html>
- McGregor, Sue L.T., dalam, “Critical Discourse Analysis- A Primer”, dalam <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>.
- Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Rusadi, Udi, “Diskursus Kerusakan Sosial Dalam Media Massa”, disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.
- Radford, Gary P. 2005. *On the Philosophy of Communication*. Thomson Wadsworth
- Seliger, dalam John B. Thompson, *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, 2003, Diterjemahkan, Haqul Yaqin, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 132.
- Shoemaker, Pamela J., Reese dan Reese, Stephen D., 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, NY, Longman Publishers USA, p. 223.
- Tiamono, Rigakittyndya, 2008, “Analisis Wacana Norman Fairclough”, dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 151.
- Veeber., J.K , *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* , Jakarta, Gramedia, 1993. H, 171.

Website :

- <http://www.thefreedictionary.com/ideology>
- <http://www.allwords.com/word-ideology.html>
- http://atheism.about.com/library/glossary/general/bldef_ideology.htm
- <http://www.freelists.org/archives/ppi/03-2006/msg00142.html>
- http://atheism.about.com/library/glossary/general/bldef_ideology.htm
- <http://www.thefreedictionary.com/ideology>; <http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>;

Teori Belajar Sosial – *Social Learning Theory*

Para peneliti sosial sepakat bahwa sebagian sikap, tata nilai, serta perilaku setiap individu dapat dikembangkan melalui pengamatan atau pengamatan terhadap model. Teori belajar sosial yang digagas oleh **Albert Bandura** adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku yang baru dapat diperoleh melalui pengamatan dan meniru orang lain. Dalam artian, pembelajaran adalah sebuah proses kognitif yang terjadi dalam suatu konteks sosial dan dapat terjadi melalui pengamatan langsung. Pembelajaran juga dapat terjadi melalui konsep *reward and punishment* atau proses penguatan.